ABSTRAK

Permainan layang-layang merupakan permainan yang dilarang di Kota Pontianak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Perda Nomor 11 Tahun 2019. Namun demikian, Penegakan hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh ketentraman,ketertiban dan perlindungan hukum. Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan,untuk mengetahui penegakan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pemain Layang-layang di Kota Pontianak,serta mengungkapkan hambatan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pemain layang-layang. Untuk membahas persoalan diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis,yakni metode penelitian hukum yang berfungsi mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi didalam masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan,serta melalui wawancara dan angket terhadap responden,diketahui bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Rumusan masalah Berdasarkan penjelasan pada latar belakang,maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Mengapa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang ketertiban Umum Mengenai Larangan Permainan Layang-Layang di Kota Pontianak Belum di Tegakan Hukumnya. Adapun menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai permainan layang-layang di Kota pontianak yang mendapat luka atau kehilangan nyawa akibat dari benang gelasan dan tali kawat layangan. Untuk mengetahui penegakan perda terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemain layang-layang,Untuk memberi informasi kepada masyarakat penegakan perda terhadap pemain layang-layang agar masyarakat mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur agar tidak menjadi suatu kebiasaaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa benar penegakan perda terhadap pemain layang-layang belum ditegakan karena Sat Pol PP Kesulitan dalam melakukan razia karena pemain layang-layang berpindah-pindah lokasi.

KATA KUNCI : Penegakan Perda,Sat Pol PP,Layang-layang

ABSTRACT

Kite flying is a game that is prohibited in Pontianak City. As regulated in Article 19 of the Regional Regulation Number 11 of 2019. However, law enforcement is intended to ensure that the community obtains peace, order and legal protection. The author raised this thesis with the aim of knowing the enforcement of local regulations by the Civil Service Police Unit against Kite Players in Pontianak City, as well as revealing the obstacles and efforts of the government in controlling kite players. To discuss the above problems in this study the author uses sociological juridical methods, legal research methods that examine applicable legal provisions and what happens in society. Based on the data obtained in the field, as well as through interviews and interviews with respondents, it is known that there are still many people who commit violations.

Formulation of the problem Based on the explanation in the background, the writer can formulate the problem as follows: Why is the Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the General Regarding the Prohibition of Kite Games in Pontianak City not yet enforced. The objectives of this study are as follows: To obtain clear data and information about kite games in Pontianak City who were injured or lost their lives as a result of glass string and kite wire rope. To find out the enforcement of regulations on violations committed by kite players, To provide information to the public on enforcing regulations against kite players so that the public knows that there are rules that regulate so that they do not become a habit.

The results obtained from this study are that it is true that the enforcement of local regulations against kite players has not been enforced because the Sat Pol PP was successful in conducting raids because the kite players moved from location to location.

KEYWORDS: Enforcement of Regional Regulations, Sat Pol PP, Kites